

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah- Pembayaran Pajak Non Tunai Bulukumba Meningkat,  
Bank Indonesia Beri Penghargaan



Sumber gambar:

<https://www.busernews24.com/read-5660-2024-04-18-pembayaran-pajak-non-tunai-bulukumba-meningkat-bank-indonesia-beri-penghargaan.html>

Berdasarkan pengalaman kasus penyalahgunaan dana pajak, terutama terkait PBB-P2 dan Pajak Reklame yang terjadi sebelumnya telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola pajak, baik di tingkat desa/kelurahan maupun di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Salah satu faktor kasus-kasus tersebut muncul karena pengelolaan pajak masih dikelola secara manual.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Bapenda mengambil langkah inovatif dengan menciptakan aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi bernama SIMPADA (Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) pada awal tahun 2022.

Kerjasama dengan Bank Sulselbar memungkinkan pengelolaan sembilan jenis pajak, termasuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, MLB, Penerangan Jalan, Reklame, Air Tanah, dan Sarang Burung Walet. Selain itu, ada aplikasi SISMIOP sebagai turunan dari Kementerian Keuangan, digunakan dalam pengelolaan PBB dan BPHTB dengan POS PBB dan e-BPHTB.

Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Sulselbar telah memperkenalkan beberapa metode pembayaran non-tunai, seperti Virtual Account dan e-commerce Qris.

Meski demikian, kurangnya literasi masyarakat terkait pembayaran non-tunai dan tantangan dalam memulihkan kepercayaan publik menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini,

Bapenda membuat program Simbol (Sistem Bayar Online) sebagai media sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan khusus untuk mengajak masyarakat Bulukumba agar memenuhi kewajiban pajaknya.

Program Simbol ini pun mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dengan menempatkan Simbol pada peringkat 5 Program Inovasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sulawesi Selatan

Capaian ini diketahui pada Asistensi Championship 2024 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Hotel Aryaduta Bali pada tanggal 17- 21 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapenda dan TP2DD se-Provinsi Sulsel dalam rangka pengisian Championship 2024.

Pelaksana program Simbol dari Bapenda Bulukumba, Andi Nurhidayat mengemukakan bahwa Simbol merupakan cara dan upaya mensosialisasikan kanal pembayaran Pajak Daerah yang telah terintegrasi, yang memungkinkan pembayaran dilakukan dengan mudah dan fleksibel tanpa harus meninggalkan rumah.

Filosofi Simbol, lanjutnya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi di Era 4.0, menjadikan layanan pajak lebih cepat, mudah, dan ekonomis sehingga tujuan pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal dapat segera dicapai.

"Simbol membantu mensosialisasikan kanal pembayaran yang ada pada Aplikasi SIMPADA dimana metode pembayaran yang tersedia sudah non tunai dan hanya dapat dilakukan melalui transfer bank, QRIS dan Virtual Account," ungkap Andi Yayat sapaan akrabnya.

Momentum penyaluran SPPT PBB ke Desa/Kelurahan pada Juni tahun 2023 yang lalu menjadi tahapan awal sosialisasi program Simbol.

Sosialisasi Simbol ini dijadwalkan selama 2 hari 1 malam di setiap kecamatan, dengan sasaran sosialisasi adalah Aparat Desa/Kelurahan yang menjadi ujung tombak penagihan PBB.

Dikatakan, metode sosialisasi Simbol dilakukan dengan menjelaskan mekanisme pembayaran pajak mulai dari pengecekan jumlah pajak yang dibayarkan hingga proses pembayaran yang dilakukan secara non tunai.

"Kita ingin memastikan bahwa masyarakat yakin betul apa yang dibayarkan itu betul betul masuk ke kas Daerah melalui transaksi non tunai," tukasnya.

Dengan model sosialisasi yang lebih santai tanpa harus di dalam ruang aula, Bapenda mensosialisasikan cara pembayaran pajak utamanya PBB menggunakan Qris Dinamis dengan aplikasi LontaraPay. LontaraPay merupakan aplikasi pembayaran PBB-P2 yang dikembangkan Bersama dengan Bank Sulselbar. LontaraPay memiliki kemudahan dalam pembayaran karena dapat menyatukan pembayaran pokok dan tunggakan dalam satu Qr code.

Adapun Kanal Instrumen dan system Non Tunai yang digunakan yaitu :

1. QRIS;
2. Mbanking Bank Sulselbar

- |    |                      |         |            |      |         |            |
|----|----------------------|---------|------------|------|---------|------------|
| 3. |                      |         |            |      |         | ATM        |
| 4. |                      | Virtual |            |      |         | Account    |
| 5. | E-commerce           | :       | Tokopedia, | Link | Aja,    | OVO, Gopay |
| 6. | Toko                 |         | Ritel      |      | Modern: | Indomaret  |
| 7. | Teller dan Agen Bank |         |            |      |         |            |

Bagaimana Dampaknya?  
 Simbol yang diluncurkan sejak pertengahan 2023 sudah memberi dampak yang signifikan. Realisasi penerimaan Pajak utamanya dari PBB-P2 melalui kanal non tunai mengalami peningkatan.

Misalnya pembayaran melalui kanal Qris dari Rp73 juta pada tahun 2022 meningkat sebanyak Rp984 juta pada tahun 2023. Begitu juga pada kanal Mobile Banking dari Rp38 juta meningkat sebesar Rp138 juta. Sementara pada kanal melalui e-commerce juga mengalami peningkatan dari Rp2,7 juta meningkat dengan capaian angka Rp86 juta.

Dengan melihat realisasi penerimaan dari kanal non tunai utamanya dari PBB yang meningkat drastis tentu akan meminimalisir terjadinya kebocoran dalam pengelolaan Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Bulukumba dapat mandiri secara fiskal di masa yang akan datang. Dan yang paling penting adalah pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak di Kabupaten Bulukumba.

Ke depannya Simbol ini akan berbentuk aplikasi digital yang menyatukan kanal-kanal pembayaran atau mengarahkan warga untuk memilih kanal yang akan digunakan membayar pajak daerah.(Rosmaniar)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://www.busernews24.com/read-5660-2024-04-18-pembayaran-pajak-non-tunai-bulukumba-meningkat-bank-indonesia-beri-penghargaan.html>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.